



Koordinasi Ke Kendari Menambah Koleksi Khasanah Sulawesi untuk CoE Sulsel

Dalam rangka mendukung pusat unggulan layanan perpustakaan dan informasi budaya lokal yang digagas oleh Perpustakaan Nasional RI atau lebih dikenal dengan istilah CENTRE OF EXCELLENCE / CoE di Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa (24/10) Tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke DPK Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari koordinasi terkait Koleksi Khasanah Sulawesi untuk mendukung Cente Of Excellence di Sulawesi Selatan.

Tim berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari Plt.Kepala DPK

Prov.SulSel, Moh.Hasan, SH, MH, Kepala Bidang Deposit PPBP, Drs.Heri Rusmana, MM, Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan, Drs.H.A.Ahmad Saransi, M.Si dan Drs Yulianto, MM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Arsip.

Kunjungan diterima secara resmi oleh Sekretaris DPK Prov.Sulawesi Tenggara di ruang kerja Kepala Dinas di Kota Kendari. Pada awal pembicaraan Kepala DPK Prov.SulSel menyampaikan terima kasih atas penerimaan kunjungan.

“Mohon maaf kami ngerepotin atas kunjungan ini”, imbuhan Hasan, masih lanjut Kepala DPK SulSel ini, kunjungan ini bagian dari kesadaran kita semua dengan latar belakang Bhineka Tunggal Ika dengan Kekayaan Budaya dan kearifan lokal yang tinggi, membutuhkan informasi terkait Koleksi Khasanah Sulawesi khususnya di Sulawesi Tenggara ini untuk selanjutnya disatukan dalam Centre Of Excellence di SulSel nanti”, tegas Staf Ahli Gubernur SulSel ini.

Sementara dari pihak DPK Prov.Sultra yang diwakili Sekretaris, Adenan, S.Sos, M.Si menyambut baik kunjungan ini dan siap memberikan informasi yang dibutuhkan, “ya Insha Allah Bapak-bapak sekalian, kami dengan penuh sinergitas akan membantukan dan memberikan spa yang Bapak-bapak butuhkan”, imbuhan Adenan.

“Semoga kedepan informasi terkait Sulawesi akan lebih mudah diakses oleh para Pemustaka”, lanjut Sekdis DPK Sultra ini. (I . N)

Editor : Puguh



Hari Pertama 4000 Pelamar CASN Kanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Verifikasi

[BeritaNasional.ID, MAKASSAR](https://beritanasional.id) – Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan menggelar pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas asli, pengukuran tinggi badan dan pemberian kartu ujian peserta seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Senin (23/10).

Kegiatan seleksi tahap kedua ini dilaksanakan mulai pukul 08.30 WITA bertempat di Datasemen-A Pelopor Brimob Polda Sulsel Jalan Sultan Alauddin Makassar dan berakhir sekitar pukul 20.00 WITA.

Untuk hari pertama ada sebanyak 4.000 peserta yang diverifikasi dari 15.792 pelamar SLTA yang dinyatakan lulus oleh panitia pusat. Jumlah ini sesuai dengan pengumuman melalui portal sscn.bkn.go.id pada hari Jumat 19 Oktober lalu.

Adapun pelaksanaan tahap kedua ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2018.



Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI melalui pengumuman nomor : SEK.KP.02.01-847 tentang pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS yang dapat diunduh melalui portal cpns.kemenkumham.go.id menyebutkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk kualifikasi SLTA sederajat pada saat melakukan verifikasi berkas dan pengukuran tinggi badan yaitu wajib membawa dokumen asli berupa ijazah/STTB, KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dan lembar bukti pendaftaran SSCN.

Mengawali kegiatan ini, Kepala Divisi Administrasi selaku ketua panitia daerah Abdul Rahman mengingatkan kepada seluruh panitia untuk menjaga semangat dan etos kerja selama pelaksanaan kegiatan.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bekerja secara profesional dan proporsional demi kesuksesan kegiatan kita” ujarnya.

Besarnya antusias pelamar terlihat dari kehadiran mereka di halaman Brimob sejak pukul enam pagi hingga malam dan dengan tertib menunggu antrian yang sudah disiapkan oleh panitia.

Untuk hari kedua, panitia masih akan memverifikasi 4.000 berkas pelamar demi mengisi alokasi untuk penjaga tahanan sebanyak 48 orang. *)

*) Humas Kanwil Kemenkumham Sulsel

Editor : Puguh



Program USAID PRIORITAS Mulai Ditutup di Beberapa Daerah di Sulsel

[BeritaNasional.ID. Makassar](#), Sulawesi Selatan, -- Program USAID PRIORITAS akan berakhir di Sulsel pada akhir bulan Mei 2017. Dari 13 kabupaten mitranya; Maros, Bantaeng dan Parepare secara resmi sudah melakukan acara penutupan tersebut. Program yang dianggap banyak berhasil ini akan dilanjutkan sendiri oleh mitra program. "Semua kabupaten yang sudah melakukan penutupan program, berkomitmen akan melanjutkan program secara mandiri," ujar Jamarruddin, Koordinator Provinsi USAID PRIORITAS Sulsel, beberapa waktu lalu

Di Maros, penutupan ditandai dengan kehadiran Bupati Maros M. Hatta Rahman, Ketua DPRD Maros, dan Kadis Pendidikan yang menyaksikan peragaan siswa tentang terjadinya hujan. Siswa SDN 39 Kassi tersebut menggunakan air asin yang dipanasi, mengalami kondensasi dan akhirnya menyebabkan hujan. Dalam sambutannya, bupati merasa terhenyak dengan penutupan program dan menyatakan akan melanjutkan program USAID PRIORITAS. Ia bahkan meminta dinas pendidikan dan pihak terkait untuk segera melakukan FGD merancang usulan kelanjutan program agar segera bisa ditampung di APBD perubahan. "Sekolah-sekolah yang belum menerapkan model pembelajaran dan manajemen berbasis sekolah yang telah dilatihkan USAID PRIORITAS, harus didorong untuk mengikutinya," ujarnya

Sebelumnya, tampil memberikan testimoni keberhasilan program adalah kepala sekolah SDN 39 Kassi, Andi Nensih. Dalam testimoninya, kepala sekolah ini mengungkapkan bahwa sekolahnya yang dulunya memiliki nilai try out ujian nasional biasa -biasa saja kini menjadi tertinggi sekecamatan, karena

aktif terapkan pembelajaran aktif. “Bahkan sekolah kami, dari akreditasi C langsung meloncat ke akreditasi A pada tahun 2016 yang lalu,” ungkapnya yang disambut dengan gemuruh tepuk tangan.

Pada tahun 2015, konsistensi menerapkan Manajemen Sekolah yang transparan dan terbuka dan menerapkan pembelajaran aktif juga mengantarkan Andi Nensih sebagai kepala sekolah terbaik tingkat SD se-Kabupaten Maros.

Sementara itu pada acara penutupan program USAID PRIORITAS di Parepare, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, H Anwar Saad mengatakan bahwa USAID PRIORITAS memiliki andil signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Parepare. “Apa yang diberikan USAID PRIORITAS dengan berbagai bentuk modifikasi pembelajaran telah mampu merubah pola pembelajaran di sekolah sehingga mutu pembelajaran meningkat. Kita berharap program ini terus berlanjut,” ujar Anwar Saad

Walau berakhir, semua modul, video training, dan berbagai success story penerapan program ini masih bisa diakses di www.prioritaspendidikan.org,” ujar Jamaruddin, Koordinator Provinsi USAID PRIORITAS Sulsel

Penutupan program USAID PRIORITAS juga akan dilakukan selama bulan Mei 2017 ini di Pinrang, Takalar, Bone, Pangkep, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Wajo, Enrekang dan terakhir di Makassar. **(adve-bernas)**



'Ganti' Tilang dengan Elus Dada, Oknum Polisi di Makassar Dilaporkan ke Propam

BeritaNasional.ID – MAKASSAR – Perempuan AN (14 tahun) didampingi keluarganya melaporkan seorang oknum polisi ke Unit Profesi dan Pengamanan (Propam) Polsek Makassar atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Kejadian itu bermula saat Perempuan AN bersama dua rekannya berboncengan sepeda motor di sekitaran Maricayya, Kecamatan Makassar, Jumat, (19/5/2017) sekira pukul 14.00 Wita.

Ketiganya terjaring operasi penertiban lalu lintas yang digelar jajaran Polsek Makassar.

Lantaran berboncengan tiga, korban pun akhirnya ditahan. Sementara dua teman korban dibiarkan pulang oleh oknum polisi.

Korban kemudian digelandang oknum polisi itu dengan

berboncengan sepeda motor ke sebuah gang (lorong) tak jauh dari lokasi sweeping.

Di lokasi tersebut, korban mengaku diraba di bagian dada dan kemaluan. Menolak diperlakukan tidak senonoh, korban kemudian kabur dan melaporkan hal yang dialaminya kepada pihak keluarga.

“Temanku disuruh pulang pak terus saya dibawa ke lorong. Saya kira mau ditilang ternyata dia (oknum polisi) malah pegang-pegang,” beber AN.

Unit Propam yang hendak menjemput paksa oknum yang tinggal di Aspol Toddopuli tersebut gagal, lantaran oknum polisi yang dimaksud dilaporkan telah kabur.

Sekedar diketahui korban adalah warga yang tinggal di salah satu lorong di Jl Kerung- Kerung Makassar, tak jauh dari Mapolsek Makassar, tempat oknum tersebut bekerja.

(sumber ://makassartoday.com)



DPM-FH Akan Gelar Seminar Nasional

Beritanasional.id-

Rencana kegiatan seminar nasional yang bertemakan “membudidayakan tolak narkoba” di bahas bersama oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fak. Hukum (DPM FH), Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FH) Univ. Satria Makassar bekerja sama dengan Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM) di salah satu Warkop (rabu,3/5)

HERMAN ketua DPM FH Unsat Makassar mengatakan landasan berpikir kegiatan ini di dasari fakta yang kita liat di sekeliling kita Bahwa Narkoba sudah sangat merajalela tanpa pandang bulu bahkan masuk di kalangan pelajar, mahasiswa

sebagai kaum intelektual, masyarakat dan aparat penegak hukum harus saling menopang. Kegiatan ini akan kami laksanakan dalam bulan Mei ini.

Narkotika bukan hanya penyalahgunaan obat terlarang tapi sudah merupakan ajang bisnis yang menggiurkan yang sudah tentunya merupakan tanggung jawab kita semua kerna bandar dan pengedar narkoba merupakan kejahatan luar biasa (ekstraordinary crime) yang harus di putus mata rantainya baik rantai besar maupun rantai kecilnya, di tambahkan AIDHIL PRATAMA PUTRA yang kini menjabat Gubernur BEM FH Unsat Makassar.

Kami siap hadir dan mensupport kegiatan ini kerna sangat bernilai positif yang menyangkut keselamatan bangsa Indonesia dari bahaya narkoba dan berharap dukungan dari Badan narkotika nasional (BNN), kepolisian dan kejaksaan...ujar MAULANA Pengurus KPM-PM Cabang Wonomulyo Mandar sulawesi barat.



Jokowi Ingin Ibu Kota di Luar Jawa, Sulsel Bisa Jadi Pilihan

BeritaNasional.ID, JAKARTA –Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa sedang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain Palangka Raya di Kalimantan Tengah, Bappenas juga mengkaji beberapa daerah lain yang bisa menjadi lokasi ibu kota baru.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengusulkan, Bappenas juga mengkaji daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai calon ibu kota pengganti Jakarta.

“Sebenarnya di Sulawesi Selatan itu pernah ada yang namanya center of Indonesia, sekitar 5 tahun yang lalu. Ini usulan dari daerah. Jadi mereka membuat bentuk simbolis, kalau peta Indonesia dilipat, tengah-tengahnya itu ada di Sulawesi,” ujar Yayat kepada **detikFinance**, Jumat (14/4/2017).

Yayat mengatakan, jika dilihat dari aksesibilitas maupun mobilitas penerbangan, dan jaringan secara eksisting, Sulsel sudah menjadi hub Indonesia, juga menjadi titik simpul yang mempertemukan Indonesia bagian barat dan timur. Sulsel memiliki jaringan bandara dan pelabuhan yang memadai.

Selain itu, akan dibangun jaringan kereta api Trans Sulawesi yang melintasi wilayah Sulsel. Contohnya jalur Makassar-Parepare sepanjang 145 km.

“Sulawesi Selatan itu masih bisa kita kembangkan,” kata Yayat.

Menurut Yayat, daerah-daerah di Sulsel yang bisa dikaji untuk menjadi lokasi ibu kota misalnya Makassar, Parepare, Bantaeng, dan Sidrap.

“Lahan di Sulsel masih bisa dikembangkan, masih bisa dicadangkan lahan. Tapi tolong tidak mengambil lahan-lahan untuk area pertanian subur. Tidak mengubah fungsi lahan-lahan pangan,” tutur Yayat.

Dia menambahkan, jika Sulsel nanti terpilih menjadi lokasi ibu kota baru, maka akan mendorong laju pertumbuhan Ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Selain itu, mendorong kawasan Indonesia Timur lebih cepat berkembang.

“Jadi doronglah ke arah timur sehingga memutar balik orientasi ekonomi yang dulunya dari timur ke barat menjadi dari barat ke timur,” ucap Yayat. (***detikFinance/wawan**)



Sulsel Siap jadi Ibukota Negara

BeritaNasional.ID–MAKASSAR – Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menilai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa yang saat ini sedang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan hal yang wajar.

Bahkan, Gubernur mengaku siap jika Bappenas melakukan supervisi terhadap empat kabupaten/kota di Sulsel sebagai lokasi ibu kota negara. Empat kabupaten/kota tersebut, yakni Kota Makassar dan Parepare, Kabupaten Bantaeng dan Sidrap.

“Kalau disupervisi itu sangat wajar, karena banyak negara yang juga melakukan pemindahan ibu kota. Sulsel ini sangat strategis tempatnya dan selalu siap jadi pilar negara. Tapi saya takut, ini hanya sekadar wacana,” akunya.

Sekadar diketahui, selain Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Bappenas juga melakukan pengkajian terhadap sejumlah daerah yang dapat dijadikan lokasi ibu kota negara baru. Khusus Provinsi Sulsel, ada beberapa daerah yang diusulkan sebagai lokasi ibu kota negara.

Pasalnya, Sulsel sebagai Hub yang menghubungkan provinsi di Indonesia bagian barat dengan timur. Apalagi, Provinsi Sulsel memiliki jaringan bandara dan pelabuhan yang memadai. Dan jaringan kereta api Trans Sulawesi yang sementara dikerjakan. (*upeks/wawan)



Aktivis Makassar Minta SBY Tindak Tegas Kader Partai yang Terjerat Korupsi di Bantaeng

Beritanasional.Id-Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan di NKRI, terlibatnya kader partai Demokrat yang

sekaligus Anggota DPRD Bantaeng (Andi Alim bahri) dalam kasus korupsi dana aspirasi bappeda kab. Bantaeng APBD T.A 2011 pada kegiatan "Program pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik". Adanya temuan kerugian negara oleh BPKP sul-sel sebesar 129 juta rupiah dari total anggaran 250 juta rupiah adalah suatu perbuatan yang mencoreng nama baik partai bentukan mantan presiden Ri, susilo bambang yudoyono.

Andi alim bahri L. Tana tersangka korupsi dana aspirasi bappeda kab. Bantaeng sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara No. Pol: BP/48a/VIII/2014 Tertanggal 12 agustus 2014 yang terjerat UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor) dan telah di temukan kerugian negara oleh lembaga audit keuangan BPKP Perwakilan sul-sel dengan No. LAPKKN-360/PW21/5/2013 Ujar Yudha Jaya

Yudha Jaya menjelaskan Bahwa Andi alim bahri. L tana yang merupakan anggota DPRD bantaeng ini tidak taat dan patuh pada AD/ART dan pakta integritas partai berwarna biru ini. Pakta integritas wajib di patuhi oleh semua kader partai demokrat di seluruh NKRI dan siap menerima sanksi dari partai jika melanggar hukum

Yudha jaya salah satu Aktivis kota makassar berharap kepada ketua majelis tinggi partai Demokrat SBY agar segera bertindak tegas dan memberikan sanksi terhadap kadernya yang mengkhianati 10 (sepuluh) point pakta integritas partai demokrat demi mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan telah mencoreng nama baik partai demokrat.

Berikut Fakta Integritas Partai Demokrat ;

1. Akan senantiasa menjaga kinerja dan integritas untuk mensejahterakan masyarakat bangsa dan negara serta senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan

moral politik partai, serta jati diri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas, dan santun.

2. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya, utamanya dalam melayani, mensejahterahkan dan melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif oleh perbedaan agama etnik, suku, gender, daerah posisi politik, dan perbedaan identitas yang lain.

3. Sesuai dengan ideologi manifesto politik dan platform Partai Demokrat dengan sungguh-sungguh, saya akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

4. Demi terciptanya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang miskin, tertinggal dan belum sejahtera melalui berbagai kebijakan program aksi dan langkah yang nyata. Semua program pro-rakyat yang dijalankan pemerintah selama ini akan tetap saya pertahankan dan akan ditingkatkan di masa mendatang.

5. Sebagai kader Partai Demokrat, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan yang berlaku. Sebagai cerminan dan perilaku saya sebagai bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada kode etik Partai Demokrat sebagai kode etik partai yang amanah dan bertanggungjawab.

6. Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di eksekutif, legislatif, pusat dan daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang capable, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

7. Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi termasuk suap yang melawan hukum dan merugikan negara, serta dari narkoba, asusila dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana maka sesuai dengan kode etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 juli 2011, maka saya akan menerima sanksi sesuai ketentuan partai yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan yang berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat atau siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

9. Sebagai warga negara dan pejabat publik yang taat hukum dan aturan serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data harta kekayaan saya kepada Dewan Kehormatan Partai beserta NPWP saya.

10. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD, maka saya yang bertugas sebagai pejabat eksekutif atau legislatif berjanji tidak akan melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam ABPN dan APBD ini Imbuh Yudha Jaya



Kapolda Sulsel Dukung Penuh Program TRC Perlindungan Anak

BeritaNasional.Id – Makassar SULSEL, Kordinator Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak (TRC PA), Naumi Lania, didampingi Korwil TRC PA Sulawesi Selatan, Advokat BakriRemmang mengunjungi Polda Sulsel, Rabu (19/4/2017).



rombongan TRC Perlindungan Anak saat diterima oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs.Muktiono, SH, MH

Naumi Lania bersama Bakri Remmang diterima langsung oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol [Drs.Muktiono](#), SH, MH didampingi Dirkrimum, Dit Intel, Kabid Humas, Kabid Kum, dan Staf Binmas, diruang tamu pimpinan, Lantai II Mapolda Sulsel.

Kunjungan Naumi Lania beserta Rombongan, dalam rangka membangun sinergitas dengan Polda Sulsel khususnya unit PPA.

“Kedatangan kami (TRC PA, Red) ke Polda Sulsel untuk membangun kemitraan TRC PA bersama unit PPA, kami juga sudah siapkan Draft MoU dengan Polda Sulsel,” kata Aktivis anak yang tak kenal lelah dalam melindungi anak indonesia ini.

Menurut Istri mantan bupati Banggai Kepulauan ini, TRC PA. Memfokuskan pada tindakan edukatif dan preventif dalam melindungi anak indonesia.

“Kami TRC PA bersama Polda Sulsel menyepakati serta memberikan dukungan penuh untuk memutus mata rantai kejahatan pada anak,” terang Naumi.

Diakui Naumi, jika saat ini pihak kepolisian sudah bekerja dengan baik dalam memproses semua laporan yang berkaitan dengan permasalahan anak, hanya saja kata Naumi akan lebih baik jika pihaknya bisa terus bergandengan dengan unit Binmas, terutama dalam hal tindakan Edukatif dan preventif.

Sementara Kapolda Sulsel menyambut baik kehadiran TRC PA, karena bagaimana pun apa yang dilakukan TRC PA sangat membantu tugas polri, Walaupun Polri sebenarnya sudah terlebih dahulu membentuk PPA.

“Banyak hal yang Polri akan sinergikan dengan pihak lain, termasuk dengan TRC PA khususnya dalam perlindungan anak, terutama dalam pencegahan,” ungkap Kapolda Sulsel.

Menurut Kapolda, saay ini pihaknya Fokus pemberantasan begal, narkoba dan pelakunya banyak anak-anak, dan yang paling penting pencegahannya.

“Saya senang dengan kehadiran TRC PA ini,” ujar Kapolda.
(suaraindonesia-news.com)



Peringatan AMARAH Akan DiPeringati Di Makassar

Berita Nasional. Makassar – Amarah mahasiswa se-kota Makassar terjadi akibat tidak adanya keseriusan pemerintah kota (pemkot) ujung pandang pada saat itu di pimpin oleh Malik b. Masri dalam menerima Aspirasi para mahasiswa karena pada hari yang bersamaan walikota ujung pandang (makassar) malah berangkat umroh tanpa peduli dengan Aspirasi mahasiswa yang akhirnya memancing amarah dan kecewa para mahasiswa dari semua kampus di kota makassar menjadi tak terkendali, diantaranya UMI, Univeristas 45, IKIP (UNM), IAIN (UIN), UNHAS, UVRI dan beberapa kampus lain di kota makassar.

Menjelang peringatan April Makassar Berdarah (Amarah) 24 April 1996 silam adalah bukti sejarah hitam kelam di kalangan mahasiswa Kota Makassar yang dimana tragedi amarah adalah peristiwa penolakan kenaikan harga angkot (petepete) di kota Makassar yang sangat mencekik sopir petepete karena harga bahan pokok lainnya ikut naik.

Peringatan amarah 1996 adalah peringatan pelanggaran HAM di kota makassar yang pernah terjadi yang sampai sekarang tidak terungkap siapa pelakunya. Korban meninggal tiga orang dari UMI dan korban luka-luka yang di alami oleh mahasiswa dari semua kampus di kota makassar pada tanggal 24 April silam.

“Peringatan Amarah (April makassar berdarah) wajib di lakukan oleh semua elemen mahasiswa se-kota makassar sebagai wujud solidaritas sesama mahasiswa di kota makassar sebagai momentum berdarah yang merenggut korban nyawa dan korban luka-luka sekaligus pelanggaran HAM yang pernah terjadi namun tak pernah terungkap siapa pelaku tragedi berdarah tersebut di kota makassar yang dulu di sebut ujung pandang” ucap mahasiswa Univ. Indonesia timur (UIT) Makassar

Pewarta : Rere saputra | Editor : Wawan / Efendi